KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
DIVISI ADMINISTRASI

NOMOR SOP	:	W.32.OT.02.02-0119
TGL PEMBUATAN	:	22 Januari 2024
TANGGAL REVISI	:	-
TANGGAL EFEKTIF	:	22 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH I NYOMAN SURYA MATARAM NIP. 197102031991031001
NAMA SOP	:	PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) KE REKENING PIHAK KE-3/ REKANAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 28 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Hukum dan HAM; 8. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.per-3/PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memahami Peraturan dalam proses penatausahaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran; 3. Memiliki kemampuan menelaah permasalahan.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Revisi DIPA oleh KPA Kantor Wilayah; 2. SOP Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran.	1. Komputer dan printer; 2. ADK (Arsip Data Komputer); 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka pelaporan keuangan tidak tepat waktu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN MELALUI SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG LS KE REKENING PIHAK KE 3 / REKANAN

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET
		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KAKANWIL SELAKU KPA	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI / PPSPM	KEPALA BAGIAN UMUM	KASUBAG KEUANGAN	BENDAHARA / BPP	KPPN	PIHAK KE 3 / REKANAN	KELENGKAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	OUTPUT	
1	PPK mengajukan permintaan pembayaran langsung (LS Pihak ke tiga) kepada KaKanwil selaku KPA	Mulai								Surat permintaan pembayaran, ringkasan kontrak, kuitansi, BAST, BAP	1 Jam		
2	KaKanwil memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Admin untuk menindaklanjuti pembayaran LS Pihak ketiga									Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Kadiv Administrasi mendisposisi kepada Bendahara/ BPP untuk meneliti permintaan pembayaran melalui LS Pihak ketiga									Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4	Kabag Umum mendisposisi kepada Kasubag keuangan untuk mengoreksi permintaan pembayaran LS pihak ke-3												
5	Kasubag keuangan mendisposisi kepada bendahara /BPP utk meneliti permintaan permbayaran melalui LS Pihak ke 3												
6	Bendahara/BPP membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS Pihak Ketiga) dan diserahkan kepada Kasubag keuangan untuk dikoreksi					Y				Draft SPM	1 Jam	Draft SPM	

7	Kasubag keuangan mengoreksi draft SPM LS, jika ya diajukan kepada kadivMIN untuk ditandatangani, jika tidak dikembalikan ke Bendahara/BPP untuk diperbaiki												
8	Kadiv Admin / PPSPM Mengoreksi draft SPM LS, jika "ya" SPM LS tersebut akan ditandatangani dan diserahkan kepada bendahara/ BPP untuk diajukan ke KPPN dan jika "tidak" akan dikembalikan kepada kasubag keuangan untuk diserahklan ke bendahara/BPP untuk dibuatkan SPM Perbaikan									Draft SPM	30 Menit	SPM	
9	Bendahara / BPP menyampaikan berkas SPM LS ke KPPN									SPM	1 Hari	Tanda Terima	
10	KPPN menerima dan mengkoreksi SPM LS, jika 'Ya' akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer ke rekening Pihak ketiga/ rekanan dan jika "Tidak" SPM LS akan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran dengan pemberitahuan penolakan, Bendahara/ BPP akan membuat SPM Perbaikan									SP2D	1 Hari	Dana masuk ke pihak ke tiga	

